Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sintang

RANWAL RENSTRA 2025-2029



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **ii**

DAFTAR GAMBAR ..... **ii**

BAB I PENDAHULAN **2**

1.1 Latar Belakang 2

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 8

1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG **11**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang 11

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang 13

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang 16

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang 31

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG **32**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang 32

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Kabupaten Sintang Periode 2025-2029 35

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kominfo Periode 2020-2024 dan Renstra Kominfo Kalbar Periode 2018-2023 36

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 41

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 42

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **43**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo Kabupaten Sintang 43

4.2 Komitmen Bersama 45

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **46**

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **48**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **59**

BAB VIII PENUTUP **61**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan 13
Tabel 2.2 Jumlah Tenaga Kontrak Dinas Kominfo Tahun 2020..... 14
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang..... 17
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang..... 17
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang..... 32
Tabel 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi 2020-2024 37
Tabel 3.3 Sasaran Strategis dan Program Kemenkominfo 38
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 44
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang..... 46
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang..... 49
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029..... 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 13

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang beserta jajarannya untuk kurun waktu tahun 2025 - 2029, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang komunikasi dan informatika, dan *Sustainable Development* (SD) atau Pembangunan Berkelanjutan.

Melalui kesempatan ini saya mengajak kepada semua unsur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dan sektor lain yang terkait untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan guna mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029.

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG MAJU, SEJAHTERA, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN”.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dan Para Pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan Rencana strategis ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna kesempurnaan penyusunan Renstra dimasa yang akan datang.

Semoga Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan dan langkah ke depan dalam melaksanakan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sintang, dan terima kasih.

Sintang, 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG



Drs. PAULINUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700605 199101 1 002

BAB I
PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang terbuka (*open government*) menjadi isu utama dalam dinamika pemerintahan di Indonesia. Hal ini dikarenakan *open government* merupakan konsepsi yang berpengaruh besar dalam mewujudukan *good government*. Bersamaan dengan itu, hasrat mewujudkan pemerintahan terbuka menjadi kebutuhan utama pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Selain dianggap adaptif dengan jiwa jaman digitalisasi yang sedang berlangsung, tetapi juga akan mampu mendorong berkembangnya nilai dan prinsip partisipasi, kontrol sosial dan akuntabilitas pemerintahan menjadi semakin baik dan optimal.

Urusan pemerintahan yang paling dekat dan sangat terkait secara fungsional dengan upaya mewujudkan pemerintahan terbuka adalah urusan Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan Kominfo masuk pada kategori urusan wajib non pelayanan dasar. Oleh karenanya, upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka harus diawali dengan penyelenggaraan urusan Kominfo yang baik, fokus dan optimal.

Di Kabupaten Sintang, penyelenggaraan urusan Kominfo sangat strategis karena beberapa pemikiran. ***Pertama;*** Urusan Kominfo menjadi garda terdepan bagi pemerintah daerah dalam beradaptasi dengan era digitalisasi yang semakin masif. Jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 73% dari total penduduk (AIPP, 2020). Selain itu, amanat UUD 1945 Pasal 28F menegaskan bahwa *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*

Kedua; Kabupaten Sintang dengan luas 21.365 km^2 yang terletak di bagian Timur Provinsi Kalimantan Barat, secara geografis memiliki tantangan komunikasi yang berat guna memperlancar

mobilitas orang, barang dan informasi. Diperlukan kebijakan komunikasi dan informatika yang handal, berkualitas dan menyeluruh sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal sesuai amanat pasal 28F UUD 1945.

Ketiga; Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Pemda berada di Dinas Kominfo, karena pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berada di domain kewenangan Dinas Kominfo.

Keempat; penyelenggaraan urusan Kominfo menjadi salah satu urusan yang memberi kontribusi terhadap PAD melalui retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Oleh karenanya, Dinas Kominfo adalah di antara pilar mewujudkan kemandirian fiskal Kabupaten Sintang dalam melaksanakan otonomi daerah.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029, peran Dinas Kominfo harus dioptimalkan guna mendukung terwujudnya pemerintahan terbuka untuk merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai salah satu komponen Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sintang 2025-2029. Tugas Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang berdasarkan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 pada misi 6: Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis. Namun penyelenggaraan urusan Kominfo bukanlah pekerjaan yang mudah karena berbagai hambatan serta kelangkaan sumber daya pendukung mengiringi upaya pengelolaan urusan Kominfo.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Dinas Kominfo Kabupaten Sintang untuk memberikan pedoman strategis dalam mengelola urusan yang menjadi domain kewenangan yang ada serta dalam upaya mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran strategis pada jangka waktu lima tahun ke depan. Renstra sebagai operasionalisasi RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator keberhasilan yang dituangkan

setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kominfo Kabupaten Sintang.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
13. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi

Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
24. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Kominfo No. 2/PER/M.KOMINFO/2008 tentang Pedoman dan Pembangunan dan penggunaan menara Bersama Telekomunikasi;
27. Peraturan Menteri Kominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda;
29. Peraturan Menteri Kominfo No 35 Tahun 2014 tentang Bakohumas;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
39. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
40. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7; Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

41. Peraturan Bupati Sintang Nomor 123 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang;
42. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029:

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
2. Menetapkan Program dan Kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.
3. Sebagai acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis capaian yang menjadi landasan penyusunan Program dan Kegiatan 5 (lima) tahun mendatang.
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyusunan program dan kegiatan antar tingkat satuan unit kerja Dinas dalam mewujudkan visi dan misi, sehingga diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan internal yang kondusif dan menghindarkan timbulnya penyimpangan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi atau disorientasi dari *Core Business*-nya.
5. Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah, serta tugas lain yang diberikan kepada Diskominfo sesuai aturan yang berlaku.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
- 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Infirmatika Kabupaten Sintang
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Kabupaten Sintang Periode 2025-2029
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kominfo Periode 2020-2024 dan Renstra Kominfo Kalbar Periode 2018-2023
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo

Kabupaten Sintang
4.2 Komitmen Bersama
Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor 123 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
   b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
   c. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Komunikasi dan Informatika;
   d. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
   e. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
   f. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksana tugas dan fungsi;
   g. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang

Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

h. penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
i. penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
j. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
k. pelaksanaan pembinaan teknis dan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Sintang;
l. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris
    1. Sub Bagian Keuangan, Program, dan Perlengkapan
    2. Sub Bagian Aparatur dan Umum
c. Bidang Informasi Publik
    1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
    2. Seksi Pelayanan Informasi Publik
    3. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik
d. Bidang Komunikasi Publik
    1. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
    2. Seksi Layanan Hubungan Media
    3. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik
e. Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika
    1. Seksi Pengelolaan Domain dan Subdomain
    2. Seksi Layanan Keamanan Informasi Publik
    3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi
f. Bidang Pengelolaan *E-Government*, Persandian dan Statistik
    1. Seksi Pengelolaan Manajemen Data, Layanan dan Informasi *E-*

Government

2. Seksi Persandian
3. Seksi Statistik

g. UPTD

h. Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Komunikasi dan Informatika didukung dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang sampai dengan bulan Desember 2020, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, Tenaga Kontrak Kerja sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Uraian	Jumlah ASN Menurut:						
	Jenis Kelamin			Golongan			
	L	P	Jumlah	II	III	IV	Jumlah
Eselon II	1	0	1	0	0	1	1
Eselon III	3	2	5	0	2	3	5
Eselon IV	10	3	13	0	12	1	13
Pelaksana Sub Bagian Aparatur dan Umum	1	0	1	0	1	0	1
Pelaksana Sub Bagian Keuangan	2	4	6	3	3	0	6
Pelaksana Bidang Informasi Publik	1	1	2	0	2	0	2
Pelaksana Bidang Komunikasi Publik	4	1	5	2	3	0	5
Pelaksana Bidang Aptika	1	0	1	1	0	0	1
Pelaksana Bidang E-Govsantik	5	0	5	2	3	0	5

Jumlah	**28**	**11**	**39**	**8**	**26**	**5**	**39**

Tabel 2.2
Jumlah Tenaga Kontrak Dinas Kominfo Tahun 2020

Uraian	**Jumlah Tenaga Kontrak Menurut:**						
	Jenis Kelamin			**Pendidikan**			
	L	**P**	**Jumlah**	**SLTA**	**DIII**	**S1**	**Jumlah**
Pelaksana Sub Bagian Aparatur dan Umum	1	3	4	1	0	3	4
Pelaksana Sub Bagian Keuangan	3	3	6	2	0	4	6
Pelaksana Bidang Informasi Publik	9	1	10	7	0	3	10
Pelaksana Bidang Komunikasi Publik	3	3	6	2	0	4	6
Pelaksana Bidang Aptika	2	3	5	2	1	2	5
Pelaksana Bidang E-Govsantik	1	5	6	3	0	3	6
Jumlah	**19**	**18**	**37**	**17**	**1**	**19**	**37**

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, telah tersedia beberapa sarana dan prasarana yang digunakan dalam kondisi baik yang terdiri dari :

a) Gedung

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang terletak di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo Sintang, terdapat aula pertemuan yang dapat menampung ± 60 orang.

b) Kendaraan

Kendaraan untuk menunjang operasional kerja aparatur di Diskominfo Kabupaten Sintang terdiri dari Kendaraan roda dua sebanyak 10 (sepuluh) unit dan Kendaraan roda empat sebanyak 2 (dua) unit.

c) Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk menunjang kinerja aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang peralatan dan perlengkapan kantor yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1) Peralatan kantor
   - Desktop PC Core i5 sebanyak 2 buah
   - Monitor sebanyak 1 buah
   - Kabel LAN sebanyak 100 M
   - HDMI *Extander* sebanyak 8 buah
   - *Table mic video conference* sebanyak 1 buah
   - *Touch panel control* sebanyak 1 buah
   - *External hard disk* sebanyak 1 buah
   - *Videotrone* sebanyak 3 buah
   - *Video conference camera* sebanyak 1 buah
   - LCD video wall “55 sebanyak 8 buah
   - *Video wall processor controller* sebanyak 1 buah

2) Perlengkapan kantor
   - Lemari Besi sebanyak 14 unit
   - Lemari Kaca sebanyak 9 unit
   - Tiang Pipa Penyangga “16 sebanyak 1 buah
   - Sirine sebanyak 1 buah
   - *Handy Talky* sebanyak 2 buah
   - *Sound System* sebanyak 1 buah
   - Router sebanyak 1 buah
   - Perkerjaan Kelistrikan sebanyak 1 pcs
   - *Wireless Router Triband* sebanyak 1 buah
   - *Wireless Presentation* sebanyak 1 buah
   - *Video wall bracket* sebanyak 8 buah
   - *Network video recorder* sebanyak 1 buah
   - *Receiving card* sebanyak 1 buah
   - *Sending card* sebanyak 1 buah
   - TB 3 system sebanyak 1 buah
   - *Box control power* sebanyak 1 buah
   - Kabel power dan kabel LAN sebanyak 1 buah
   - *Gronding protection kit* sebanyak 1 buah

- *Testing comissioning* dan pelatihan sebanyak 1 buah
- Pondasi dan rangka frame sebanyak 1 buah
- Dudukan frame sebanyak 1 buah
- Pondasi tiang sebanyak 1 buah
- Mekanikal dan elektrikal sebanyak 1 buah
- Pemasangan jaringan PLN 10 kWh sebanyak 1 buah
- *IP CCTV camera indoor* sebanyak 2 buah
- *Switch unmanage* sebanyak 1 buah
- Kabel HDMI *active optical* sebanyak 8 buah
- HDMI *splitter* sebanyak 2 buah

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

Sebelum berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebelumnya dijalankan oleh 4 (empat) OPD yaitu:

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang (Bidang Komunikasi dan Informatika);
2. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang (Bidang Statistik);
4. Bagian Umum (Bidang Sandi dan Telekomunikasi).

Setelah resmi berdiri sendiri sebagai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, kewenangan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada keempat OPD tersebut berpindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (RPJMD, dll)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah penyelenggaraan PPID Pemerintah Daerah*)				1 kegiatan	1 kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan				100%	100%			
2	Jumlah media puar publik, videotron yang dipelihara*)				2 vidtron	3 vidtron				2 vidtron	3 vidtron				100%	100%			
3	Jumlah laporan monitoring dan pembinaan aspirasi pembangunan				1 laporan	1 laporan				1 laporan	1 laporan				100%	100%			
4	Jumlah laporan penyebarluasan informasi dan program pembangunan melalui media luar ruang				7 laporan	8 laporan				5 laporan	3 laporan				71%	37,5%			
5	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk dan dibina				10 kelompok	20 kelompok				8 kelompok	20 kelompok				80%	100%			
6	Jumlah hotspot publik				8 station	10 station				8 station	8 station				100%	80%			
7	Persentase ketersediaan data dan informasi				100%	100%				100%	100%				100%	100%			
8	Persentase Media Komunikasi dan konten				100%	100%				100%	100%				100%	100%			
9	Persentase pengumpulan, pengelolaan dan analisis data statistik daerah				100%	100%				100%	100%				100%	100%			
10	Jumlah OPD yang mendapat layanan Domain dan Sub Domain				40 OPD	40 OPD				37 OPD	37 OPD				92,5%	92,5%			

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan		Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI																		
Pemeliharaan jaringan telepon dan televisi	-	-				-	-	-			-	-						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	990.000				1.098.000	990.000				100%	100%						Permendagri 90 Tahun 2019
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	77.274.718	101.600.000				75.716.770	35.184.663				98%	35%						Permendagri 90 Tahun 2019
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.000.000	-				725.000	-				73%	-						
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.571.900	-				1.571.900	-				100%	-						
Penyediaan jasa kebersihan kantor	63.000.000	-				63.000.000	-				100%	-						
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	887.000				-	887.000	-			-	100%						Permendagri 90 Tahun 2019

Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan		Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	10.882.446	-			-	7.880.000	-			-	72%						Permen dagri 90 Tahun 2019
Penyediaan alat tulis kantor	24.544.659	-				24.535.000	-				100%	-						
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	107.820.500				-	106.402.800				-	99%						Permen dagri 90 Tahun 2019
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.300.000	1.250.000				3.300.000	1.250.000				100%	100%						Permen dagri 90 Tahun 2019
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	74.711.500	7.000.000				74.711.500	7.000.000				100%	100%						Permen dagri 90 Tahun 2019
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	407.000				-	407.000				-	100%						Permen dagri 90 Tahun 2019
Penyediaan makanan dan minuman	3.135.000	-				3.135.000	-				100%	100%						
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	108.855.000	-				108.845.985	-				100%	-						
Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	63.895.000	-				63.795.000	-				100%	-						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	124.923.300				-	124.703.100				-	100%						Permen dagri 90 Tahun 2019
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	696.714.000	665.159.400				667.883.481	386.127.500				96%	58%						Permen dagri 90 Tahun 2019
Penyediaan tenaga kontrak																		

Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan		Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
Peringatan Hari lang Tahun Republik Indonesia	0	-				0	-				0	-						
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	0	-				0	-				0	-						
Pameran Pembangunan	0	-				0	-				0	-						
Jasa tenga pendukung dan operasional dan keamanan perkantoran	-	-				-	-				-	-						
Penyediaan Bahan bakar Minyak (BBM) dan Gas	5.000.000	-				5.000.000	-				100%	-						
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-				-	-				-	-						
Penataan dokumen arsip	3.768.000	-				3.768.000	-				100%	-						
Penataan aset	3.768.600	-				3.768.600	-				100%	-						
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	1.460.000				-	1.460.000				-	100%						Permendagri 90 Tahun 2019
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR																		
Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	57.750.000				-	57.750.000				-	100%						Permendagri 90 Tahun 2019
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	56.980.000	-				56.980.000	-	-			100%	-						
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																		

Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan		Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pengadaan peralatan gedung kantor						-	-				-	-	-			0	0	
Pengadaan mebeleur						-	-				-	-						
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						-	-				-	-						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	12.800.000				-	12.800.000				-	100%						Permen dagri 90 Tahun 2019
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	-	0				-	0				-	0						Permen dagri 90 Tahun 2019
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	1.460.000				-	1.460.000				-	100%						Permen dagri 90 Tahun 2019
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	0				-	0				-	0						Permen dagri 90 Tahun 2019
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-				-	-				-	-						
Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	-	-				-	-				-	-						

Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan		Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	-				-	-	-			-	-	-			0	0	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																		
Pendidikan dan pelatihan formal	9.477.248	-				9.477.248	-				100%							
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	1.911.000	-				1.911.000	-				100%	-						
Penyusunan Anggaran, Laporan Semesteran, Prognosis dan Laporan Realisasi Keuangan	-	-				-	-	-			-	-						
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	3.468.000	-				3.468.000	-	-			100%	-						
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	3.465.000	-				3.465.000	-				100%	-						
Penyusunan laporan barang dan inventaris kantor	3.500.000	-				3.500.000	-				100%	-						

Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan		Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	979.000	-				976.500	-				100%	-			-			
Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran perangkat daerah	-	-				-	-				-	-		-	-			
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA																		
Pengumpulan data Pendukung Pembangunan Desa Broadband, Media Informasi Televisi dan BTS	-	-	-			-	-	-			-	-	-	-	-			
Monitoring dan Pembinaan Aspirasi Pembangunan Masyarakat	-	-	-			-	-	-			-	-	-	-	-			
Monitoring dan Pembinaan Desa Broadband Terpadu	-	-	-			-	-	-			-	-	-	-	-			
Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Menara Telekomunikasi ke Luar Daerah Kabupaten	-	-	-			-	-	-			-	-	-	-	-			
Penyebarluasan Informasi dan Program Pembangunan melalui Tatap Muka dan Media Luar Ruang	-	-	-			-	-	-			-	-	-	-	-			
Rencana Induk teknologi, Informasi dan Komunikasi	200.000.000	-	-	-	-	198.605.000	-	-	-	-	99%	-	-	-	-	0	0	

Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan		Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Telematika	-	-	-			-	-	-			-	-	-			0	0	
Pengadaan Komputer Diskominfo	-	-	-			-	-	-			-	-	-			0	0	
Koordinasi Pengembangan Lembaga Informasi Publik	-	-	-			-	-	-			-	-	-			0	0	
Pengkajian Sinergitas Pengembangan e-Government Daerah	-	-	-			-	-	-			-	-	-			0	0	
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI																		
Pelatihan Teknologi Informasi dan Komputer, Jaringan Komputer, Server dan web Programer	-	-	-			-	-	-			-	-	-			0	0	
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA																		
Pembinaan dan pengembangan jarring Komunikasi dan Informasi	-	-				-	-				-	-				0	0	
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	62.799.000	-				62.799.000	-				100%	-						
Pengadaan dan Pengembangan Data Center dan Command Center pemerintah Daerah	-	-				-	-				-	-				0	0	

Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan		Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pengendalian administrasi pelaporan pembangunan	0	0				0	0				0%	-				0	0	
Pengadaan dan Pengembangan Jaringan Internet Publik (Hotspot Publik)	100.032.000	0	-			100.032.000	0	-			100%	0	-					
Pengelolaan dan Penyelenggaraan PPID Pemerintah Daerah	108.810.645	0				108.105.645	0				99%	-						
Pembentukan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	76.632.000	0				76.526.000	0				100%	-						
Koodinasi dan Konsultasi Peningkatan Bidang Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	9.235.000	0				9.235.000	0				100%	-						
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan dan Pebgelolaan e-Government Pemerintah daerah	-	-				-	-				-	-						
Pemeliharaan rutin/berkala website sintang.go.id	35.534.000	0				35.524.000	0				100%	-						
Pemeliharaan rutin/berkala website diskominfo.sintang.go.id	-	-				-	-				-	-						
Penyelenggaraan e-Government Kecamatan se-Kabupaten Sintang	18.748.000	-				18.748.000	-				100%	-						

Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan		Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pengelolaan dan pemeliharaan media luar publik, videotrone	0	-				0	-	92.354.000			0%	-				0	0	
Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	0	-				0	-	37.535.000			0%	-				0	0	
Pengkajian dan Penyusunan Peraturan Bupati Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-				-	-	33.121.800			-	-				0	0	
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	-	-				-	-	35.625.000			-	-				0	0	
Pengelolaan dan monitoring jaringan internet publik (hotspot publik)	39.368.000	0				39.325.000	0	210.598.800			100%	-						
Penyediaan Informasi Publik terkait Covid-19	255.750.000	-	-			255.660.000	-	-			100%	-				0	0	
Pengadaan Peralatan Mini Command Center untuk Pelayanan Publik dalam Penanganan Covid-19	970.500.000	0	-			966.101.300	-	-			100%	-				0	0	
Pembangunan Sarana Publikasi Kabupaten dalam Penanganan Covid-19	500.900.000	-	-			440.279.000	-				88%	-				0	0	
Pembuatan Video Sosialisasi New Normal	165.884.000	-	-			165.232.000	-				100%	-				0	0	
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																		

Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan		Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	-	9.273.000	-			-	9.200.600	-			-	99%	-			0	0	Permen dagri 90 Tahun 2019
Pelayanan Informasi Publik	-	41.718.000	-			-	11.855.600	-			-	28%	-			0	0	Permen dagri 90 Tahun 2019
Layanan Hubungan Media	-	2.152.610.000	-			-	17.773.000	-			-	1%	-			0	0	Permen dagri 90 Tahun 2019
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media danKemitraan Komunitas	-	43.282.836	-			-	41.282.836	-			-	95%	-			0	0	Permen dagri 90 Tahun 2019
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	-	30.000.000	-			-	29.995.000	-			-	100%	-			0	0	Permen dagri 90 Tahun 2019
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-	27.755.000	-			-	27.734.600	-			-	100%	-			0	0	Permen dagri 90 Tahun 2019
Penguatan kapasitas Sumber Daya Komunukasi Publik	-	17.914.700	-			-	17.897.200	-			-	100%	-			0	0	Permen dagri 90 Tahun 2019
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	-	134.874.500	-			-	133.341.100	-			-	99%	-			0	0	Permen dagri 90 Tahun 2019
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA																		

Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan		Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	21.094.000	-	-			21.094.000	-	-			100%	-	-			0	0	
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	-				-	-				-	-				0	0	
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (BTS)	30.900.000	-				30.515.000	-				99%	-						
Pengelolaan dan Pendataan Menara Telekomunikasi (BTS)	0	-				0	-				0%	-				0	0	
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA																		
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	-	45.178.000	-			-	45.178.000	-			-	100%	-			0	0	Permendagri 90 Tahun 2019
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	-	16.700.000	-			-	1.100.000	-			-	7%	-			0	0	Permendagri 90 Tahun 2019
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	-	37.320.000	-			-	8.720.000	-			-	23%	-			0	0	Permendagri 90 Tahun 2019

Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan		Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	2.240.000	-			-	2.240.000	-			-	100%	-			0	0	Permen dagri 90 Tahun 2019
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	91.444.000	-			-	13.146.400	-			-	14%	-			0	0	Permen dagri 90 Tahun 2019
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH																		
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	24.950.000	-				24.660.000	-				99%	-						
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL																		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	-	9.887.000				-	9.887.000				-	100%				0	0	Permen dagri 90 Tahun 2019
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI																		
Monitoring dan Pemeliharaan Peralatan Radio Kecamatan	13.935.000	-				13.935.000	-				100%	-						
Pengelolaan dan Pengembangan Persandian	30.613.000	-				30.608.000	-				100%	-						

Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan		Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI																		
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	6.594.000	-			-	6.240.800	-			-	95%	-			0	0	Permendagri 90 Tahun 2019
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	7.151.000	-			-	6.015.000	-			-	84%	-			0	0	Permendagri 90 Tahun 2019

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan *e-government.*
2. Memperkuat keterbukaan informasi publik oleh pemerintah daerah.
3. Program Gerakan Menuju 100 *Smart City* Indonesia. Kabupaten Sintang harus berupaya masuk dalam gerakan *Smart City* Indonesia tersebut.
4. Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5. Hadirnya kebijakan satu data (PerPres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia), yaitu menghasilkan pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6. Maraknya penyebaran hoaks, konten negatif, dan perbuatan *cyber crime* melalui kemajuan teknologi informasi.
7. Membangun sistem jaringan dan komunikasi intra Pemerintah Daerah.

2.4.2 Peluang

Adapun peluang yang bisa memberikan peluang berkembangnya bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang di masa depan antara lain:

1. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
2. Keinginan yang tinggi dari masyarakat untukmemperoleh informasi;
3. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat;
4. Adanya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat (komunikasi);
5. Media massa, elektronik dan online yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupunswasta;
6. Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan produktif;
7. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

Terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Kualitas SDM kominfo masih sangat terbatas	Minim nya kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan Komunikasi, sehingga kemampuan merespon dinamika yang berkembang baik internal maupun eksternal belum Optimal	Rekrutmen SDM diskominfo belum tepat/terbatas
2.	Minimnya perbaikan tatakelola dan sarana pendukung diskominfo	Belum maksimalnya kinerja pelayanan Informasi dan Komunikasi	Dukungan anggaran yang terbatas
3.	Penguatan PPID utama untuk mendukung pelayanan informasi masih belum maksimal	Belum optimalnya ratio/indeks keterbukaan informasi pada kabupaten sintang	Rendahnya responsif OPD dalam pemenuhan penyediaan data pendukung, dan SDM yang terbatas.
4.	Minimnya penyediaan sarana dan membangun proses komunikasi publik yang berkualitas	Belum optimal edukasi literasi kepada masyarakat	Dukungan anggaran yang terbatas
5.	Akses jaringan telekomunikasi dan internet di berbagai kecamatan terutama daerah pedalaman masih sangat rendah	Terbatas dan minimnya akses internet di wilayah perdesaan	Minimnya sarana dan prasrana pendukung dalam akses internet di wilayah perdesaan
6.	Belum maksimalnya menciptakan internet desa (Ides) mendukung terwujudnya desa mandiri.	Masih terdapat desa yang statusnya blankspot	Terbatasnya akses internet di wilayah perdesaan
7.	Belum dilakukan	Pembangunan integrasi data	Belum optimalnya

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	pengadaan jaringan intra pemerintah daerah	berbasis elektronik belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.	komunikasi dan koordinasi yang bersifat membangun sinergeritas, koordinasi baru pada penyampaian informasi sepihak, belum ada *follow up* untuk merangkai infrastruktur dasar yang telah dibangun
8.	Minimnya upaya edukasi literasi media kepada kelompok masyarakat	Belum optimalnya edukasi literasi kepada kelompok masyarakat	Masyarakat belum mendapatkan informasi dengan baik dan cendrung terprovokasi berita hoaks, Minimnya budaya partisipasi dan konsultasi melalui literasi terhadap hak informasi serta kebijakan penyediaan informasi
9.	Belum dilakukan fasilitasi pembentukan KIM	Belum optimal pemberdayaan KIM	Keterbatasan SDM dalam memfasilitasi pembentukan KIM
10.	Belum dilakukan penyusunan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik	Tidak tersedianya informasi perencanaan arah kebijakan pembangun pelayanan pemerintah berbasis elektronik	dukungan anggaran yang terbatas
11.	Belum maksimalnya penyusunan regulasi daerah tentang urusan kominfo	Penysunan regilasi daerah tentang urusan kominfo yang tidak relefan dan diperlukan penyesuaian dan perbaikan.	Kesinambungan kebijakan dan program pusat/kementerian, provinsi dan kabupaten dalam bidang informasi dan kamunikasi publik tidak optimal
12.	Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaandata statistik pembangunan daerah	Ketersediaan data statistik sektoral yang tidak efekif, akurat dan akuntable	Tingkat responsif dari OPD yang masih minim
13.	Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di	Tidak memiliki Tenaga khusus yang memahami proses bisnis Keamanan	Rekrutmen SDM diskominfo belum tepat/terbatas.

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang	informasi	Terbatasnya anggaran untuk diklat/kursus tenaga pengamanan informasi.
14.	Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi	Tingkat keamanan data yang tidak memadai	Terbatas nya penganggaran
15.	Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah.	Keterbatasan personil yang mumpuni Prosedur yang belum tertata dengan baik	Rekrutmen SDM diskominfo belum tepat/terbatas

Selain permasalahan di atas, Dinas Kominfo Kabupaten Sintang juga dihadapkan berbagai tantangan yang semakin besar dan kompleks dalam mengahdapi tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kementerian Kominfo bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam membuat program Gerakan Menuju 100 *Smart City* Indonesia. Pemilihan kabupaten atau kota berdasarkan beberapa parameter dan diantaranya menyangkut urusan Kominfo. Oleh karenanya Kabupaten Sintang harus berupaya masuk dalam gerakan *Smart City* Indonesia tersebut.
2. Guna menjawab tantangan di era digital dan revolusi industri 4.0, mendorong setiap pemerintah daerah agar segera menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Konkritnya yaitu menyiapkan sebuah portal data pemerintahan daerah yang memuat seluruh data kecamatan se-Kabupaten Sintang dan bisa diakses oleh instansi pemerintah sendiri maupun publik.
3. Hadirnya kebijakan satu data melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
4. Maraknya penyebaran hoaks dan perbuatan *cyber crime* melalui

kemajuan teknologi informasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Kabupaten Sintang Periode 2025-2029

Dalam perumusannya, visi 2025-2029 ternyata masih sama dengan visi lima tahun sebelumnya (2025 - 2029). Hal ini menunjukkan bahwa Bupati periode 2026 - 2030 yang terpilih pada periode 2025-2029 akan menuntaskan perwujudan visi lima tahun kedepan . Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 tersebut adalah: ***"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG MAJU, SEJAHTERA, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN".***

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan yang tetap berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan termasuk menyediakan fasilitas olahraga yang mendukung pola hidup sehat.
3. Melaksanakan toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama dalam kerukunan kehidupan antar dan intern umat beragama dengan tetap meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu mendorong peningkatan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi ekonomi daerah dan desa untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi dan menambah ruang terbuka hijau dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan

ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari (berlanjut).

6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yaitu meningkatkan kualitas aparatur termasuk aparatur desa agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kominfo Periode 2025-2029 dan Renstra Kominfo Kalbar Periode 2025-2029

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024

Dalam penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024, selain Visi Indonesia 2045 dan Visi Misi Presiden Republik Indonesia, Arahan Utama Presiden Republik Indonesia untuk pemerintahan lima tahun ke depan juga menjadi pertimbangan penentuan arah kebijakan meliputi:

1. Pembangunan SDM

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan dua undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan

menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi dan Misi, serta Arahan Utama Presiden Republik Indonesia di atas, diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan yang dituangkan ke dalam RPJMN 2025-2029. Dengan tema "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" Ketujuh agenda pembangunan beserta target-targetnya menjadi acuan penting terkait arah kebijakan dan strategi nasional.

Tabel 3.2
Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika 2025-2029

No	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	1. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik; 2. Mempercepat digitalisasi penyiaran (*analog switch off*), untuk meraih *digital dividend;* dan 3. *Farming* dan *reframing* frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.
2.	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	1. Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi *next broadband* (5G); 2. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional; dan 3. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman.
3.	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital	1. Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat; dan 2. Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis.
4.	Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan	1. Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia; dan 2. Mendukung percepatan implementasi Sistem

No	Arah Kebijakan	Strategi
		Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5.	Mempercepat penyelesaian legislasi primer	1. Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
6.	Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	1. Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir; dan 2. Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah.
7.	Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	1. Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan *smart services*, dan inovasi perencanaan penganggaran.

Dalam melaksanakan seluruh arah kebijakan dan strategi di atas, Kemenkominfo menerjemahkannya ke dalam 10 (sepuluh) sasaran strategis yang akan dicapai melalui 5 (lima) program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sasaran Strategis dan Program Kemenkominfo

No	Sasaran Strategis	Program
1.	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
2.	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	
3.	Meningkatnya konektivitas layanan pos	
4.	Terwujudnya konektivitas *Next Generation Broadband* Nasional	
5.	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan Spektrum	Program Pengelolaan Layanan Publik

No	Sasaran Strategis	Program
	Frekuensi, layanan publik bidang pos, telekomunikasi Standar Perangkat dan informatika	
6.	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
7.	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	
8.	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	
9.	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi	Program Komunikasi dan komunikasi publik Publik
10.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Program Dukungan baik Manajemen	

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada satu dekade terakhir terus mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dalam meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK, Kemenkominfo menyelenggarakan program penyediaan akses *broadband* nasional, khususnya di wilayah non komersial, antara lain melalui pembangunan Palapa Ring sebagai jaringan *backbone* nasional, serta penyediaan BTS dan akses internet. Untuk wilayah komersial, Kemenkominfo melakukan upaya-upaya untuk peningkatan *coverage* baik *mobile broadband* maupun *fixed broadband* melalui program bantuan pemerintah layanan akses *fixed broadband* untuk percepatan penetrasi *fixed broadband*, dan regulasi infrastruktur pasif bersama.

Selain itu, Kemenkominfo juga mendorong proses migrasi penyiaran dari analog ke digital, dengan modernisasi pemancar LPP TVRI, penyelenggaraan penyiaran *simulcast*, dan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran. Kemenkominfo juga menyelenggarakan program untuk mendorong pemanfaatan TIK pada sektor ekonomi dan pemerintahan serta meningkatkan stabilitas pertahanan keamanan. Program seperti Program 1000 *Startup* Digital

yang bertujuan mendorong pengembangan ekosistem digital nasional. Selain itu, juga dilaksanakan program-program yang mendorong peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi dengan adopsi TIK, contohnya Program UMKM *Go Online* yang bertujuan untuk mendorong UMKM dalam negeri onboard ke *marketplace*, dan Program Petani Nelayan *Go Online* yang bertujuan meningkatkan kapasitas petani dan nelayan dalam memperluas pasar dan mengelola hasil produksi. Pada bidang pemerintahan dan stabilitas pertahanan keamanan, Kemenkominfo secara aktif memiliki peran untuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keamanan informasi, mendorong penggunaan tanda tangan digital, pengendalian konten, dan upaya pelindungan data pribadi. Kemenkominfo juga memiliki program-program yang ditujukan langsung ke masyarakat untuk siap menghadapi era digital, contohnya program Literasi Digital untuk meningkatkan *awareness* masyarakat dalam menggunakan internet dan perangkat TIK. Selain itu, Kemenkominfo juga berkontribusi menyiapkan SDM nasional baik industri maupun pemerintahan untuk bisa *shifting* di era digital, dengan memberikan pelatihan *Digital Talent.*

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

Dalam penyusunan Renstra Tahun 2018-2023, visi dan misi Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah :

"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Insfrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan".

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka misi Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan percepatan pembangunan insfrastruktur
b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *governance*
c. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat
d. Mewujudkan masyarakat sejahtera
e. Mewujudkan masyarakat yang tertib
f. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

Selain visi dan misi, tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat konsisten dengan tugas pokok dan fungsi yang

secara kolektif menggambarkan arah strategis dinas dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang tahun 2016-2036, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Sintang yang aman, nyaman, produktif dan berkualitas menuju kabupaten mandiri, demokratis, dan sejahtera berbasis pertanian,perkebunan dan pariwisata yang didukung oleh sistem permukiman dan pengelolaan sumberdaya yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan.

Selanjutnya, RTRW yang merupakan matra spasial dalam pembangunan daerah,diharapkan menjadi pedoman bagisemua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran yang bersifat saling melengkapi dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Namun demikian masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Dengan telah ditetapkannya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang, maka menjadi kewajiban bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu, Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang sebagai lembaga pelayanan yang menjalankan urusan komunikasi dan informasi publik, persandian dan statistik, dituntut untuk lebih proaktif/tanggap terhadap perkembangan permasalahan pembangunan di Kabupaten Sintang.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan berbagai telahaan yang telah dilakukan seperti uraian di atas, maka bersama ini ditetapkan penentuan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang sebagai berikut:

1) Belum optimalnya perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik, statistik dan persandian;
2) Terbatasnya pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik, Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
3) Lemahnya kapasitas pengelolaan konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
4) Belum optimalnya Pelayanan Informasi Publik dan kinerja PPID Utama serta PPID pembantu;
5) Rendahnya literasi digital masyarakat;
6) Belum maksilnanya layanan hubungan media dan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
7) Belum optimalnya penerapan manajemen komunikasi krisis daerah;
8) Terbatasnya kapasitas sumber daya komunikasi publik;
9) Belum tersusunya Rencana induk SPBE dan pengelolaan pusat data daerah;
10) belum terbangunnya sistem Jaringan intra Pemerintah daerah dan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
11) belum maksimalnya keamanan informasi dan pengelolaan data dan Informasi Elektronik;
12) masih terbatasnya sumber daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
13) belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral Pemerintah Daerah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo Kabupaten Sintang

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2029 dan dalam upaya menuju tercapainya Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
			Tujuan	Sasaran		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3.2. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan Kolaboratif	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Capaian Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	96 (Menuju Informatif)	96 (Menuju Informatif)	97 (Informatif)	98 (informatif)	99 (Informatif)	100 (Informatif)
			Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	7	14	28	42	57	71
			Meningkatnya pemanfaatan aplikasi informatika	Capaian Predikat Indeks SPBE	Predikat	2,3 (Kurang)	2,85 (Cukup)	2,96 (Cukup)	(Cuk3 up)	3,15 (Baik)	3,37 (Baik)
			Meningkatnya kualitas layanan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah	Indeks keamanan informasi	Nilai	450	470	500	520	550	580
			Tersusunnya data statistik sektoral yang terintegrasi setiap tahunnya	Capaian Predikat Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Predikat	2,1	2,2 Terkelola	2,3 Terdefinisi	2,4 Terdefinisi	2,5 Terdefinisi	3 Terdefinisi

4.2 Komitmen Bersama

Untuk memastikan keberhasilan pencapiaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tahun 2025-2029, maka seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang harus memiliki komitmen organisasi yang dijabarkan dengan kalimat ringkas namun padat yang biasa disebut dengan slogan atau *tagline*. Disadari bahwa slogan atau *tagline* merupakan suatu produk bahasa yang bertujuan untuk menggambarkan suatu nilai pokok yang dianut, untuk menjelaskan kelebihan produk organisasi yang diinginkan serta yang menarik dan mudah diingat oleh semua pihak yang terlibat dengan pencapain tujuan tertentu.

Adapun komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tertuang dalam slogan atau *tagline* yaitu: "TERBUKA ITU HEBAT". Makna dari *tagline* "TERBUKA ITU HEBAT" yaitu suatu komitmen, motivasi, semangat dan keinginan serta kebanggan diri yang teguh dari seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang untuk menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029. Adapun strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Maju, Sejahtera, Berkualitas Dan Berkelanjutan			
MISI 3 : Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis			
TUJUAN 2	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
3.2. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan Kolaboratif	3.2.2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital	Peningkatan pengelolaan informasi publik dan peningkatan akses dan mutu komunikasi publik	1. Meningkatkan kinerja PPID utama dan PPID pembantu 2. Meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan informasi publik 3. Meningkatkan jumlah media komunikasi publik 4. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam komunikasi publik 5. Meningkatkan jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM)
		Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan	1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika pada semua OPD dan ruang publik 2. memperkuat sinyal dan jaringan internet

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Maju, Sejahtera, Berkualitas Dan Berkelanjutan			
MISI 3 : Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis			
TUJUAN 2	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
		layanan publik	daerah 3. Meningkatkan pembangunan aplikasi untuk mewujudkan *e-government* 4. Meningkatkan pengetahuan teknologi informasi bagi aparatur 5. Meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung *e-government*
		Peningkatan pelayanan persandian daerah	Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian
		Peningkatan pelayanan statistik sektoral daerah	1. Meningkatkan SDM Pengelola Satatistik Sektoral Daerah 2. Meningkatkan kerjasama dengan BPS dalam pengelolaan statistik sektoral

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang yang akan dan harus dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/SUBKEGIATAN
3.2. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan Kolaboratif	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Capaian Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik			Capaian Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Relasi Media
						Pelayanan Informasi Publik
						Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik
						Penyusunan Konten
						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan			Persentase Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
	Meningkatnya pemanfaatan aplikasi informatika	Capaian Predikat Indeks SPBE			Capaian Predikat Indeks SPBE	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
						Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
						Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan
						Penyediaan Akses Internet
						Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

	Meningkatnya kualitas layanan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah	Indeks keamanan informasi			Indeks keamanan informasi	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
	Tersusunnya data statistik sektoral yang terintegrasi setiap tahunnya	Capaian Predikat Indeks Pembangunan Statistik (IPS)			Capaian Predikat Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
						Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
										2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (2026)			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																
Melakukan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya urusan penunjang Pemerintah Daerah**	**2**	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														Sekretariat	Sintang
		2	**16**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	**4,340,403,464**	12 Bulan	**4,340,403,464**	12 Bulan	**4,340,403,464**	12 Bulan	**4,340,403,464**	12 Bulan	**4,340,403,464**	12 Bulan	**4,340,403,464**		Sintang
		2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	4,340,403,464	12 Bulan	4,340,403,464	12 Bulan	4,340,403,464	12 Bulan	4,340,403,464	12 Bulan	4,340,403,464	12 Bulan	4,340,403,464	Sekretariat	Sintang
		2	**16**	**01**	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Tercapainya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	**10,836,400**	100 %	**11,920,040**										Sintang
		2	16	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tercapainya retribusi daerah tahun 2022	100 %	100 %	10,836,400	100 %	11,920,040	100%	13.950.000	100%	15.500.000	100%	16.750.000	100%	16.750.000	Sekretariat	Sintang
		2	16	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0		0									Sekretariat	Sintang
		2	**16**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	tersedianya pakaian Dinas beserta Atributnya	77 stel	78 stel	**59,655,000**	78 stel	**65,620,500**	78 stel	77.650.000	78 stel	81.200.000	78 stel	83.000.000	78 stel	83.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
										2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (2026)			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	77 stel	78 Stel	59,655,000	78 Stel	65,620,500	78 Stel	77.650.000	78 stel	81.200.000	78 stel	83.000.000	78 stel	83.000.000	Sekretariat	Sintang
		2	**16**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Penunjang Administrasi Umum															
		2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat LIstrik		4 Jenis	3,839,000	4 Jenis	4,222,900	6 jenis	5.100.000	8 jenis	6.800.000	10 jenis	7.500.000	10 jenis	7.500.000	Sekretariat	Sintang
		2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor Bahan Komputer Kulkas Pengadaan ALat Pendingin Pengadaan Komputer Pengadaan Printer		23 Jenis 4 Jenis 1 unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit	117,267,900	23 Jenis 4 Jenis 1 unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit	120,000,000	23 Jenis 4 Jenis 1 unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit	123.000.000	23 Jenis 4 Jenis 1 unit 6 Unit 7 Unit 6 Unit	126.000.000	23 Jenis 4 Jenis 1 unit 8 Unit 9 Unit 6 Unit	128.000.000	23 Jenis 4 Jenis 1 unit 10Unit 11Unit 6 Unit	128.000.000	Sekretariat	Sintang
		2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cleaning Service Peralatan kebersihan	3 Orang	3 Orang 13 Jenis	45,319,000	3 Orang 13 Jenis	4,985,090	3 Orang 13 Jenis	5.780.000	3 Orang 13 Jenis	6.800.000	3 Orang 13 Jenis	7.300.000	3 Orang 13 Jenis	7.300.000	Sekretariat	Sintang
		2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BBM Makan Minum Rapat	12 Bulan 550 kotak	1000 Liter 330 Kotak	19,603,595	1000 Liter 330 Kotak	21,563,954	1000 Liter 330 Kotak	23.678.456	1000 Liter 330 Kotak	25.554.000	1000 Liter 330 Kotak	27.890.000	1000 Liter 330 Kotak	27.890.000	Sekretariat	Sintang
		2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bahan Cetak	10.000 lembar	10 Jenis	46,220,000	10 Jenis	80,000,000	10 Jenis	85.000.000	10 Jenis	90.000.000	10 Jenis	95.000.000	10 Jenis	95.000.000	Sekretariat	Sintang
		2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar	3 Jenis	1 Jenis	23,640,000	1 Jenis	20,000,000	1 Jenis	24.000.000	1 Jenis	25.000.000	1 Jenis	26.000.000	1 Jenis	26.000.000	Sekretariat	Sintang
		2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Keluar Daerah	14 Kecamatan 39 Kali	14 Kecamatan 39 Kali	114,929,000	14 Kecamatan 39 Kali	200,000,000	14 Kecamatan 39 Kali	215.000.000	14 Kecamatan 39 Kali	217.000.000	14 Kecamatan 39 Kali	220.000.000	14 Kecamatan 39 Kali	220.00.000	Sekretariat	Sintang
		2	**16**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Kendaraan Dinas Perorangan dan Jabatan, Gedung Kantor dan Mebel														Sekretariat	Sintang
		2	16	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Mobil Dinas Jabatan		1 unit	500.000.000											Sekretariat	Sintang
		2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kursi Putar Lemari Makan Meja Kerja Meja Kompor Tersedianya Lemari Arsip		30 Buah 1 Unit 20 Unit 1 Buah 2 Unit	62,850,000	30 Buah 1 Unit 20 Unit 1 Buah 2 Unit	150,000,000	30buah 1 Unit 20 unit 1 Buah 2 Unit	160.000.000	31buah 1 Unit 20 unit 1 Buah 2 Unit	165.000.000	32buah 1 Unit 20 unit 1 Buah 2 Unit	170.000.000	33buah 1 Unit 20 unit 1 Buah 2 Unit	170.000.000	Sekretariat	Sintang

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
										2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (2026)			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2	16	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor		1 Unit	4.000.000.000									1 Unit	4.000.000.000	Sekretariat	Sintang
							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Mobil Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	450.000.000									1 unit	450.000.000	Sekretariat	Sintang
							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Penyuluhan	Tersedianya Mobil Dinas Penyuluhan		1 Unit	700.000.000									1 Unit	700.000.000	Sekretariat	Sintang
							Pengadaan Papan Reklame	Tersedianya Papan Reklame		2 Unit	400.000.000	2 Unit	400.000.000	2 unit	400.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	8 Unit	1.600.000.000	Sekretariat	Sintang
							Pengadaan Ruang Studio Podcast beserta Alat Studio	Tersedianya ruang studio podcast beserta alat studio		1 Unit	250.000.000									1 Unit	250.000.000	Sekretariat	Sintang
		2	**16**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	tersedianya surat menyurat														Sekretariat	Sintang
		2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Matrai 10.000	100 Lembar	200 Lembar	2,000,000	200 Lembar	2,200,000	250 Lembar	2.500.000	270 Lembar	2.700.000	290 Lembar	2.900.000	290 Lembar	2.900.000	Sekretariat	Sintang
		2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Internet Belanja Listrik	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	131,636,000	12 Bulan 12 Bulan	130,000,000	12 Bulan 12 Bulan	133.000.000	12 Bulan 12 Bulan	135.000.000	12 Bulan 12 Bulan	140.000.000	12 Bulan 12 Bulan	140.000.000	Sekretariat	Sintang
		2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Personal Komputer		5 Unit	3,650,000	5 Unit	4,015,000	6 unit	6.000.000	7 unit	7.000.000	8 unit	8.000.000	8 unit	8.000.000	Sekretariat	Sintang
		2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jaminan Kecelakaan Jaminan Kematian Jaminan Kesehatan Tersedianya Tenaga Kontrak	38 Orang 38 Orang 38 Orang 38 Orang	39 Orang 39 Orang 39 Orang 39 Orang	726,080,400	39 Orang 39 Orang 39 Orang 39 Orang	750,000,000	39 Orang 39 Orang 39 Orang 39 Orang	770.000.000	39 Orang 39 Orang 39 Orang 39 Orang	770.000.000	39 Orang 39 Orang 39 Orang 39 Orang	780.000.000	39 Orang 39 Orang 39 Orang 39 Orang	780.000.000	Sekretariat	Sintang
		2	**16**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dan pemeliharaan kendaraan angkutan dan kendaraan perorangan														Sekretariat	Sintang

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
										2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (2026)			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan Roda 4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		2 Unit 12 Jenis	40,475,000	2 Unit 12 Jenis	45,000,000	2 Unit 12 Jenis	50.000.000	2 Unit 12 Jenis	55.000.000	2 Unit 12 Jenis	60.000.000	2 Unit 12 Jenis	60.000.000	Sekretariat	Sintang
		2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3 unit	7 Unit 15 Jenis	57,485,000	7 Unit 15 Jenis	60,000,000	7 Unit 15 Jenis	70.000.000	7 Unit 15 Jenis	80.000.000	7 Unit 15 Jenis	90.000.000	7 Unit 15 Jenis	90.000.000	Sekretariat	Sintang
		2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan AC		8 Unit	4,880,000	8 Unit	5,368,000	8 Unit	6.300.000	8 Unit	6.900.000	8 Unit	7.800.000	8 Unit	7.800.000	Sekretariat	Sintang
		2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bahan Bangunan		14 Jenis	6,916,200	14 Jenis	7,607,820	15 jenis	8.700.000	16 jenis	9.600.000	17 jenis	10.300.000	17 jenis	10.300.000	Sekretariat	Sintang
		2	**16**	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**	Tersedianya fasilitasi pelayanan publik		12 Bulan	**5,000,000**	12 Bulan	**0**									Sekretariat	Sintang
		2	16	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersedianya PPID Pembantu Pada Diskominfo Kab. Sintang		1 Kegiatan	5,000,000	1 Kegiatan	6.000.000	1 Kegiatan	7.000.000	1 Kegiatan	8.000.000	1 Kegiatan	9.000.000	1 Kegiatan	9.000.000	Sekretariat	Sintang
Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	**Capaian Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik**	**2**	**16**	**02**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik													Sintang
		2	**16**	**02**	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Pemerintah Daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika													Sintang
		2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik		1 Dokumen	18,846,000	1 Dokumen	21.000.000	1 Dokumen	24.000.000	1 Dokumen	26.000.000	1 Dokumen	28.000.000	1 Dokumen	28.000.000	Bidang Informasi Publik	Sintang
		2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan akhir kegiatan Jumlah monitoring dan evaluasi penggunaan media komunikasi		1 dokumen 1 kali	12,922,000	1 dokumen 1 kali	14.000.000	1 dokumen 1 kali	16.000.000	1 dokumen 1 kali	18.000.000	1 dokumen 1 kali	20.000.000	1 dokumen 1 kali	20.000.000	Bidang Informasi Publik	Sintang
		2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten dan Media Komunikasi Publik Jumlah CCTV		12 Bulan 5 buah	30.000.000	12 Bulan 5 buah	45.000.000	12 Bulan 5 buah	60.000.000	12 Bulan 5 buah	75.000.000	12 Bulan 5 buah	100.000.000	12 Bulan 25 buah	131.000.000	Bidang Pengelolaan e-Govsantik	Sintang

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
										2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (2026)			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Indeks layanan informasi publik	86 poin	88 poin	110,391,000	90 poin	120.000.000	92 poin	130.000.000	94 poin	140.000.000	95 poin	150.000.000	95 poin	150.000.000	Bidang Informasi Publik	Sintang
		2	16	02	2.01	03	monev dan penetapan Agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Evaluasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	3 dokumen	1.000.000	4 dokumen	1.100.000	6 dokumen	1.210.000	8 dokumen	1.331.000	10 dokumen	1.464.100	10 dokumen	1.464.100	Bidang Komunikasi Pubik	Sintang
		2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan perencanaan Media komunikasi Publik	Jumlah pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	10 konten	20 konten	1.000.000	25 konten	1.100.000	30 konten	1.210.000	35 konten	1.331.000	40 konten	1.464.100	40 konten	1.464.100	Bidang Komunikasi Pubik	Sintang
		2	16	02	2.01	05	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah penyelenggaraan media komunikasi publik Pemerintah Daerah	2 media	2 media	25.000.000	4 media	27.500.000	6 media	30.250.000	8 media	33.275.000	10 media	36.602.500	10 media	36.602.500	Bidang Komunikasi Pubik	Sintang
								jumlah penyelengaraan disemenasi pesan di media	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	3 dokumen	5.500.000	5 dokumen	6.050.000	7 dokumen	6.655.000	10 dokumen	7.320.500	10 dokumen	7.320.500		
								jumlah Evaluasi Penggunaan media komunikasi publik	3 bulan	3 bulan	35.000.000	3 bulan	38.500.000	6 bulan	42.350.000	9 bulan	46.585.000	12 bulan	51.243.500	12 bulan	51.243.500		
		2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah pengelolaan layanan hubugan media	20 Media	25 Media	1.250.000.000	30 media	1.375.000.000	35 media	1.512.500.000	40 media	1.663.750.000	45 media	1.830.125.000	45 media	1.830.125.000	Bidang Komunikasi Pubik	Sintang
		2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku kepentingan	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Kelompok Media Tradisional, Komunitas Pembuat Konten Positif, dll.	5 kelompok	15kelompok	40.000.000	20 kelompok	44.000.000	25 kelompok	48.400.000	30 kelompok	53.240.000	35 kelompok	58.564.000	35 kelompok	58.564.000	Bidang Komunikasi Pubik	Sintang
		2	16	02	2.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	jumlah penyiapan penangan komunikasi krisis	2 berkas	4 berkas	50.000.000	5 berkas	55.000.000	6 berkas	60.500.000	7 berkas	66.550.000	8 berkas	73.205.000	8 berkas	73.205.000	Bidang Komunikasi Pubik	Sintang
								jumlah pengelolaan komunikasi krisis	1 berkas	2 berkas	150.000.000	3 berkas	165.000.000	4 berkas	181.500.000	5 berkas	199.650.000	6 berkas	219.615.000	6 berkas	219.615.000		
								Jumlah Evaluasi Penanganan Komunikasi Krisis	1 berkas	2 berkas	50.000.000	3 berkas	55.000.000	4 berkas	60.500.000	5 berkas	66.550.000	6 berkas	73.205.000	6 berkas	73.205.000		
		2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber daya Komunikasi Publik	Jumlah pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi publik	50 orang	55 orang	100.000.000	60 orang	110.000.000	70 orang	121.000.000	90 orang	133.100.000	100 orang	146.410.000	100 orang	146.410.000	Bidang Komunikasi Pubik	Sintang
								Jumlah penyediaan dan pemberian konsultasi serta advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi	2 orang	5 orang	35.000.000	10 orang	38.500.000	15 orang	42.350.000	20 orang	46.585.000	25 orang	51.243.500	25 orang	51.243.500	Bidang Komunikasi Pubik	Sintang

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
										2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (2026)			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penyedian/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah daerah di Kabupaten Sntang	3 videotron	4 videotron	400.000.000	5 videoton	440.000.000	6 videotron	484.000.000	7 videotron	532.400.000	8 videotron	585.640.000	8 videotron	585.640.000	Bidang Komunikasi Pubik	Sintang
Meningkatnya pemanfaatan aplikasi informatika	**Capaian Predikat Indeks SPBE**	**2**	**16**	**03**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Meningakatnya Kualitas Aplikasi Informatika															Sintang
		2	**16**	**03**	2.01		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Terselenggaranya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		12 Bulan		12 Bulan											Sintang
		2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah website sintang.go.id dan disokominf.sintang.go.id yang dipelihara	2 website	2 website	53,585,000	2 website	60.000.000	2 website	70.000.000	2 website	80.000.000	2 website	90.000.000	2 website	90.000.000	Bidang Aptika	Sintang
		2	**16**	**03**	2.02		**Pengelolaan egovernment Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya Penatalaksanaan dan Pengawasan EGovernment dalam Penyelengaraan Pemerintah Daerah		12 Bulan		12 Bulan											Sintang
		2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan egovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan dan jumlah aplikasi informatika	100 orang	68.000.000	23,500,000	33 apl	60.000.000	34 apl	67.000.000	35 apl	75.000.000	36 apl	83.000.000	36 apl	83.000.000	Bidang Aptika	Sintang
		2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	70%	80%	18,033,000	85%	25.000.000	90%	30.000.000	95%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	Bidang Egovsantik	Sintang
							Penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Indeks SPBE	1 dok	1 dok	420.000.000	1 dok	420.000.000	1 dok	420.000.000	1 dok	420.000.000	1 dok	420.000.000	1 dok	420.000.000	Bidang Egovsantik	Sintang
							Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Kabupaten Sintang	Tersedianya penyelenggaraan pusat data dan pusat pemulihan bencana	70%	75%	150.000.000	80%	170.000.000	85%	190.000.000	90%	210.000.000	95%	230.000.000	100%	250.000.000	Bidang Egovsantik	Sintang

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
										2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (2026)			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							Penyelenggaraan tanda tangan elektronik Pemerintah Kabupaten Sintang	Tercapainya keamanan informasi dan layanan tanda tangan elektronik Pemerintah Kabupaten Sintang	70%	75%	150.000.000	80%	160.000.000	85%	170.000.000	90%	180.000.000	95%	190.000.000	100%	200.000.000	Bidang Egovsantik	Sintang
							Penyelenggaraan serifikat elektronik pada layanan public dan pemerintahan di lingkungan Pemerintah kabupaten sintang	Tercapainya keamanan informasi dan layanan sertifkat elektronik Pemerintah Kabupaten Sintang	70%	75%	150.000.000	80%	160.000.000	85%	170.000.000	90%	180.000.000	95%	190.000.000	100%	200.000.000	Bidang Egovsantik	Sintang
							Penyusunan rencana induk kota cerdas (masterplane smart city)	Indeks SPBE	1 dok	1 dok	350.000.000	1 dok	350.000.000	1 dok	350.000.000	1 dok	350.000.000	1 dok	350.000.000	1 dok	350.000.000	Bidang Egovsantik	Sintang
							Penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) Pemerintah kabupaten Sintang	Indeks SPBE	70%	75%	70.000.000	80%	75.000.000	85%	80.000.000	90%	85.000.000	95%	90.000.000	100%	95.000.000	Bidang Egovsantik	Sintang
		2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS) milik Provider Swasta yang berada dalam Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Jumlah Infrastruktur Menara Telekomunikasi BTS-USO BAKTI Kementerian Kominfo yang berada dalam Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Laporan Pelaksanaan Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Menara Telekomunikasi (BTS) sebagai penunjang sistem penghubung layanan Pemerintah di Kabupaten Sintang	128 Menara 44 Menara 1 Dokumen	128 Menara 44 Menara 1 Dokumen	63,992,000	128 Menara 44 Menara 1 Dokumen	90,327,677	128 Menara 44 Menara 1 Dokumen	110.000.000	128 Menara 44 Menara 1 Dokumen	130.000.000	128 Menara 44 Menara 1 Dokumen	140.000.000	128 Menara 44 Menara 1 Dokumen	140.000.000	Bidang Aptika	Sintang

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
										2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (2026)			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Laporan pelaksanaan pengelolaan dan monitoring bidang aplikasi informatika dinas komunikasi dan informatika kabupaten sintang	1 Dokumen	1 Dokumen	61,870,000	1 Dokumen	0	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		Bidang Aptika	Sintang
		2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**24,420,000**		**26,862,000**										
Tersusunnya data statistik sektoral yang terintegrasi setiap tahunnya	**Capaian Predikat Indeks Pembangunan Statistik (IPS)**	**2**	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		100 %	**24,420,000**	100 %	**26,862,000**	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	Bidang Pengelolaan e-Govsantik	Sintang
		2	**20**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	100 %	100%	**24,420,000**	100%	**26,862,000**	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	Bidang Pengelolaan e-Govsantik	Sintang
		2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Cakupan data statistik sektoral yang dirilis	100%	100%	24,420,000	100%	26,862,000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	Bidang Pengelolaan e-Govsantik	Sintang
Meningkatnya kualitas layanan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah	**Indeks keamanan informasi**	**2**	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**22,442,000**		**24,686,200**										
		2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		100 %	**22,442,000**	100 %	**24,686,200**	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	Bidang Pengelolaan e-Govsantik	Sintang
		2	**21**	**02**	2.02		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota		12 Bulan	**22,442,000**	12 Bulan	**24,686,200**	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	Bidang Pengelolaan e-Govsantik	Sintang

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
										2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (2026)			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks keamanan informasi	215 poin	300 poin	22,442,000	400 poin	45.000.000	500 poin	55.000.000	580 poin	60.000.000	600 poin	70.000.0000	600 poin	70.000.0000	Bidang Egovsantik	Sintang

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Diskominfo Kabupaten Sintang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang. Target indikator kinerja Diskominfo Kabupaten Sintang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Diskominfo Kabupaten Sintang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang.

Berikut ditampilkan indikator kinerja Diskominfo Kabupaten Sintang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

No	Indikator	Data Capaian Tahun awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	Capaian Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik	96	96	97	98	99	100	100
2.	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	7	14	28	42	57	71	71

No	Indikator	Data Capaian Tahun awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
3.	Capaian Predikat Indeks SPBE	2,3	2,96	3	3,15	3,37	3,51	3,51
4.	Indeks keamanan informasi	450	470	500	520	550	580	580
5.	Capaian Predikat Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	3	3

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

No	Indikator	Data Capaian Tahun awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	Cakupan Pengembangan KIM ditingkat Kecamatan	7	14	58	42	57	71	7
2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	28	30	32	34	36	40	28
3.	Tersedianya sistem data dan statistik terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII
PENUTUP

Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Namun meskipun demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Renstra ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029, yaitu: "***TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG MAJU, SEJAHTERA, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN***" dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam RPJMDKabupaten Sintang 2025-2029.

Sintang, 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG

Drs. PAULINUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700605 199101 1 002